

## EVALUASI DAMPAK KEBERADAAN SISTEM ELEKTRONIK MANAJEMEN PENYIDIKAN (E-MP) DALAM MEMBANTU PROSESPENYIDIKAN DI RESERSE KRIMINAL POLRES BOJONEGORO

**Achmad Zaenan Naim<sup>1)</sup>, Priyanto<sup>2)</sup>**

<sup>1)2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: Naimrika1728@gmail.com

### ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus bergerak cepat dan telah menghadirkan berbagai reformasi birokrasi secara gradual dengan tidak mengenal batas baik menurut tempat dan waktu, maka sebagai institusi besar Polri melalui Bareskrim Polri beberapa telah mengembangkan system Elektronik Manajemen Penyidikan (E-Manajemen Penyidikan). Melalui system E-Manajemen Penyidikan ini seluruh penyidik maupun penyidik pembantu dari tingkat pusat dalam hal ini pada satker Bareskrim hingga tingkat Polda, Polres sampai dengan Polsek tidak bisa lagi mengelak dari tuntutan jaman yang serba digital untuk lebih memperbaiki kualitas kerja dan kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro sudah berjalan dengan sangat baik dan sudah terintegrasi secara nasional. Pengembangannya terus dilakukan Bareskrim Polri dan mendapat dukungan yang sangat baik dari personil Penyidik/ Penyidik pembantu agar menjadi sistem yang memuat database perkara pidana yang akan mempermudah dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang cepat dan akurat, serta terwujudnya transparansi, sekaligus sebagai sarana kontrol/ pengendalian dan raport kinerja penyidik. Kemudian Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) merupakan perwujudan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015- 2019 tahap III Polri yang diperuntukan bagi Penyidik/ Penyidik pembantu dalam sistem manajemen penyidikan dan sebagai database perkara pidana guna mewujudkan tranparansi. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pembuatan dokumen penyelidikan dan penyidikan dan dapat diakses dengan mudah dimana dan kapan saja oleh Atasan Penyidik, sehingga dapat secara cepat mendeteksi permasalahan dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelesaiannya, selain sebagai sarana penilaian kinerja personil.

**Kata Kunci: Efektivitas, Elektronik Manajemen Penyidikan**

### ABSTRACT

*Along with technological advances that continue to move rapidly and have presented various gradual bureaucratic reforms that know no boundaries both according to place and time, as a large institution of the National Police through Bareskrim Polri several have developed an Electronic Investigation Management system (E-Management Investigation). Through this E-Investigation Management system, all investigators and assistant investigators from the central level, in this case the Criminal Investigation Unit to the Polda, Polres, and Polsek, can no longer escape the demands of an all-digital era to further improve work quality and performance through the use of information technology. . The results of this study indicate that the Implementation of Electronic Investigation Management (E-MP) in the Criminal Investigation Unit of the Bojonegoro Police has been running very well and has been integrated nationally. Its development continues to be carried out by Bareskrim Polri and receives very good support from investigator/assistant investigator personnel so that it becomes a system that contains a criminal case database that will facilitate the collection, processing and presentation of data quickly and accurately, as well as the realization of transparency, as well as a means of control/ control and report on the performance of investigators. Then Electronic Investigation Management (E-MP) is a manifestation of the embodiment of the 2015-2019 Phase III National Police Strategic Plan (Renstra) which is intended for investigators/assisting investigators in the investigation management system and as a criminal case database to realize transparency. This application is designed to facilitate the preparation of investigative and investigative documents and can be accessed easily anywhere*

*and at any time by Investigative Supervisors, so that they can quickly detect problems in the implementation of investigations and their resolution, as well as a means of evaluating personnel performance.*

**Keywords:** *Effectiveness, Electronic Investigation Management*

## **A. LATAR BELAKANG**

Penggunaan internet terus meningkat, karena saat ini internet merupakan sebagai suatu kebutuhan. Penyalahgunaan internet banyak terjadi, salah satunya yang disebabkan oleh bebasnya dalam penggunaan internet. Sistem pemerintah yang diterapkan pada suatu negara dapat pula menjadikan terjadinya meningkatnya penyerangan dari dunia maya.

Keamanan dan ketertiban di Indonesia menjadi salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan hak-hak masyarakat untuk memperoleh keamanan dan ketertiban bersama telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Ayat 4 juga menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia lah yang bertugas untuk memberikan hak-hak keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum yang ada.

Inovasi pelayanan publik saat ini menjadi suatu hal yang sangat diperhitungkan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat, apalagi dengan adanya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang mulai diselenggarakan sejak tahun 2014

Semenjak adanya SINOVIK yang ditujukan untuk ranah layanan instansi pemerintah, inovasi layanan dengan jenis E-government sering dijumpai di Indonesia sebagai salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Fungsi Penyidik juga dimiliki oleh Penyidik Reskrim di wilayah hukum Polres Bojonegoro sebagai salah satu bagian dari Polri di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Melalui Penyidikan diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana dapat terselesaikan secara optimal.

Namun kenyataannya banyak kasus yang memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya bahkan ada kasus yang tidak jelas kapan dapat diselesaikan. Oleh karena itu Bareskrim Polri berupaya meningkatkan kinerja Penyidik dengan menggunakan teknologi dalam

bentuk penerapan Elektronik Penyidikan atau e-Manajemen Penyidikan. Dengan e-Manajemen Penyidikan, masyarakat dilibatkan dalam pengawasan sehingga dapat memantau perkembangan kasus dari mana saja.

Tahun 2017 Bareskrim Polri telah mengimplementasikan sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) yang dapat diakses oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam setiap aktivitasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan harapan dapat terwujud pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung alat material khusus (almatsus) Polri berbasis teknologi kepolisian.

Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) merupakan sarana perubahan budaya kerja sistem penyidikan Polri yang semula pembuatan dokumen dilakukan dengan cara konvensional menjadi lebih modern dengan menjadikan dokumen administrasi penyidikan (mindik) merupakan bagian daripada sistem yang terintegrasi dengan sistem lain di internal Polri dan akan terus dikembangkan hingga dapat terhubung dengan sistem lain diluar Polri melalui Sistem Penanganan Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI).

Pada pra-penelitian diperoleh informasi bahwa menurunnya aktivitas personil Penyidik/ Penyidik reserse kriminal Polres Bojonegoro dalam melakukan akses E-MP lebih dikarenakan sebagian personil belum memahami secara utuh apa yang terdapat didalam aplikasi E-MP dan bagaimana penggunaannya, serta manfaat apa yang diperoleh dari aplikasi ini, sehingga dianggap hanya menyulitkan bahkan menghambat penyidik dalam melakukan pemberkasan perkara, disamping beban kerja yang cukup besar dihadapi personil untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum lainnya, sehingga dalam melakukan akses sering terlambat dan tidak optimal. Keberadaan elektronik manajemen penyidikan ini didasarkan pada fakta bahwa masih kurang pedulinya para penyidik/ penyidik pembantu untuk melakukan pengisian E-Manajemen Penyidikan dan masih lemahnya kontrol secara maksimal dari atasan penyidik maupun pimpinan kesatuan. Selain itu belum

dipahami secara menyeluruh tentang digitalisasi Program E-Manajemen Penyidikan yang merupakan inovasi pengawasan kinerja penyidik/penyidik pembantu baik pada tingkat Bareskrim Polri maupun tingkat ujung tombak terdepan reserse di Polsek sehingga belum dijadikannya hasil analisa evaluasi program E-Manajemen Penyidikan sebagai penilaian kinerja setiap individu penyidik/penyidik pembantu, dan belum ada produk yang mengisyaratkan kewajiban bagi penyidik/penyidik pembantu untuk mengisi pekerjaannya ke program E-Manajemen Penyidikan dan kewajiban atasan penyidik untuk melakukan pengawasan.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana dampak keberadaan system penyidikan yang ada di Polres Bojonegoro dalam melakukan proses penyidikan dan mampu mengatasi tindak kriminalitas di Kabupaten Bojonegoro, dan juga bagaimana bentuk system ini bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk memantau sejauh mana proses penanganan perkara oleh penyidik Polres Bojonegoro. Dan judul yang akan diambil oleh peneliti adalah **“Evaluasi Dampak Keberadaan Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-Mp) Dalam Membantu Proses Penyidikan Di Reserse Kriminal Polres Bojonegoro”**

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Kebijakan Publik

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Menurut Woll sebagaimana dikutip

Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### 2. Konsep Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

### 3. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan padapemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

#### a. Tipe Pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

#### b. Tipe Kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

#### c. Tipe Ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang

dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

#### 4. Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan

##### a. Efektivitas

Menurut Winarno (2002: 184): Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya.

##### b. Efisiensi

Menurut Winarno (2002: 185): Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

##### c. Kecukupan

Menurut Winarno (2002: 186): Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

##### d. Perataan

Menurut Winarno (2002: 187): Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

##### e. Responsivitas

Menurut Winarno (2002: 189): Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

##### f. Ketepatan

Menurut Winarno (2002: 184): Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

#### 5. Konsep Dasar Inovasi

Bartos (2002) mendefinisikan inovasi yang tepat bagi sektor publik yaitu suatu perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang mengarah kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau kuantitas atau kualitas output oleh suatu organisasi.

Pengertian inovasi menurut Nurdin yaitu sesuatu yang baru, yang dikenalkan dan dilakukan praktik atau proses baru (baik barang ataupun layanan) atau bisa juga sesuatu yang baru namun hasil adopsi dari organisasi lain.

Dari defenisi para tokoh tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Inovasi erat kaitannya dengan perubahan sebuah ide atau rencana yang dihadapi oleh sebuah kelompok/organisasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inovasi menjadi satu kunci yang bisa digunakan oleh kelompok/organisasi dalam menghadapi sebuah perubahan. Defnisi inovasi yang cenderung positif karena inovasi menjadi strategi yang digunakan oleh organisasi untuk menyediakan manajemen perubahan yang

efektif. Organisasi akan berbicara mengenai bagaimana poin-poin keterbaruan yang menjadi karakter inovasi dapat dikembangkan secara keseluruhan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan kontrol sehingga dapat menghubungkan semua aspek organisasi.

## 6. e-Government: Pelayanan Publik Berbasis IT

E-government adalah layanan Information and Communication Technologies (ICT) yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, untuk meningkatkan hubungan antara warga, swasta dan pemerintah. Tuntutan perkembangan TIK berimbas kepada meningkatnya layanan pemerintah kepada warganya. E-government memiliki 4 hubungan dasar : Government to Citizen/G2C (Pemerintah dengan warga), Government to Business/G2B (Pemerintah dengan swasta), Government to Government/G2G (Pemerintah dengan pemerintah), Government-to-Employee/G2E (Pemerintah dengan Pegawaiinya/ASN).

Faktor kunci keberhasilan E-government di adalah:

- a. Kebijakan
- b. Kelembagaan
- c. Kepemimpinan

## 7. Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajemen suatu organisasi atau bisnis. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif. SIM meliputi berbagai aspek, seperti pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi yang relevan bagi manajemen.

SIM biasanya digunakan dalam berbagai bidang manajemen, seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, produksi, pemasaran, dan lain-lain. SIM juga dapat diintegrasikan dengan sistem lain, seperti Enterprise Resource Planning (ERP) dan Customer Relationship Management (CRM), untuk memudahkan pengelolaan informasi.

Manfaat dari penerapan SIM antara lain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya,

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memudahkan koordinasi dan komunikasi antar departemen, serta meningkatkan daya saing organisasi atau bisnis di pasar.

## 8. Elektronik Manajemen Penyidikan (e-MP)

Bareskrim Polri berupaya meningkatkan kinerja Penyidik dengan menggunakan teknologi dalam bentuk penerapan Elektronik Penyidikan atau e-Manajemen Penyidikan. Dengan e-Manajemen Penyidikan, masyarakat dilibatkan dalam pengawasan sehingga dapat memantau perkembangan kasus dari mana saja. Berdasarkan data, sistem e-Manajemen Penyidikan akan menghimpun banyak hal mulai dari data Penyidik yaitu kompetensi, komitmen Penyidik, historical perkara yang pernah ditangani seorang Penyidik dan indeks penilaian kinerja seorang Penyidik.

Sebagai database, e-Manajemen Penyidikan ini juga berisi data-data hasil proses Penyidik perkara pidana yang ditangani oleh seluruh satuan kerja (satker) dan sub satuan kerja (subsatker) reserse di tingkat Polsek, Polres, Polda hingga Bareskrim. Lebih lanjut, e-Manajemen Penyidikan juga berisi data hilangtemu kasus- kasus terkait kendaraan bermotor hingga executive summary dalam bentuk matriks, grafik serta peta. Aplikasi e-Manajemen Penyidikan ini merupakan inovasi dalam pelayanan yang dilakukan oleh Polri yang memudahkan kontrol pimpinan atas penanganan kasus yang masuk.

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki fenomena sosial. Pada jenis penelitian ini, peneliti menjadi instrumen kunci dan peneliti harus mempunyai wawasan dan rasa penasaran yang sangat luas akan penelitian yang akan diteliti agar mampu menggali informasi, bertanya, dan mampu menganalisis obyek yang akan diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah yang akan diteliti masih belum jelas, dan juga untuk mengembangkan teori-teori, serta memastikan

kebenaran data penelitian.

## 2. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Pada penelitian ini, yang menjadi fokus kajian penelitian adalah menganalisa permasalahan apa saja yang terjadi pada implementasi system elektronik manajemen penyidikan di reserse kriminal Polres Bojonegoro. Kemudian yang jadi focus penelitian kedua adalah meneliti bagaimana dampak keberadaan system elektronik manajemen penyidikan dalam membantu proses penyidikan di reserse kriminal Polres Bojonegoro. Fokus tersebut akan diteliti menggunakan teori William N. Dunn dengan beberapa poin sebagai bahan pembedah masalah yaitu :

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

## 3. Lokasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 399) lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian untuk pengambilan data adalah unit reserse criminal Polres Bojonegoro yang terletak di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Alasan dalam pengambilan di lokasi penelitian karena peneliti ingin meneliti bagaimanakah proses penanganan penyidikan melalui system elektronik manajemen penyidikan.

## 4. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi yang dibutuhkan oleh peneliti baik mengenai situasi maupun kondisi. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui isi permasalahan yang akan diteliti. Pada kesempatan ini peneliti memperoleh informasi dari personel penyidik Polres Bojonegoro yang bertugas untuk

menginput dan mengoperasikan system elektronik manajemen penyidikan.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

NO	INFORMAN PENELITIAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas Pertanian	1 Orang
2	Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat	1 Orang
3	Petugas Pelayanan dan Informasi	2 Orang
4	Masyarakat Pengguna Pelayanan Publik	10 orang

Sumber: Diolah Peneliti

## 5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi Kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan dasar dalam menganalisa apa saja permasalahan dengan menggunakan buku-buku dari beberapa ahli.
- b. Studi Lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi yaitu meliputi proses wawancara, dokumentasi, dan observasi.

## 6. Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Data dianalisis dengan menggunakan interaktif Miles Hurberman, A, M, dan Saldana, J.

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi Data
- c. Penyajian Data
- d. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian, maka dalam konsep pengembangan perlu memperhatikan tentang ketersediaan lahan, letak geografis, jenis tanah, agroklimat, sumber daya wilayah, sarana dan prasarana. Sumber daya dan kondisi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan dan prospek terhadap perkembangan pembangunan wilayah.

Kepolisian Resor Bojonegoro atau Polres Bojonegoro merupakan institusi Polri yang berwenang dalam urusan penegakan hukum di wilayah kabupaten Bojonegoro. Lokasi Polres Bojonegoro terletak di Jalan MH Tamrin Nomor 46 Kecamatan Bojonegoro dengan kode pos 62113.

### Gambaran Umum Elektronik Manajemen Penyidikan

Sistem Informasi E-MP adalah aplikasi yang berbasis website yang digunakan oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam sistem manajemen penyidikan, sebagai sarana pengendalian dan database perkara pidana. Aplikasi epenyidikan diharapkan dapat meningkatkan layanan Bareskrim. Layanan akan semakin cepat, komunikasi yang tepat dan baik, sehingga masyarakat merasa lebih terlayani. Sistem e-penyidikan bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik.

Melalui system E-Manajemen Penyidikan ini seluruh penyidik maupun penyidik pembantudari tingkat pusat dalam hal ini pada satker Bareskrim hingga tingkat Polda, Polres sampai dengan Polsek tidak bisa lagi mengelak dari tuntutan zaman yang salah satu tujuannya agar lebih memperbaiki kualitas kerja dan kinerja.

Adapun system ini bertujuan sebagai pengontrol dan pengawasan setiap pekerjaan penyidik dan penyidik pembantu sehingga diketahui proses perjalanan kasusnya apakah terdapat hambatan atau telah tuntas P21 bahkan dihentikan Penyidikannya (SP3) karena berbagai faktor. Karena pada system ini penyidik maupun penyidik pembantu diwajibkan untuk mengisi data mengenai beban tanggung jawab kinerja yang telah diberikan. Hal ini juga menggambarkan berapa waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan satu perkara

yang ditangani.

Muatan dari system E-Manajemen Penyidikan ini akan menghimpun banyak hal mulai dari data penyidik maupun penyidik pembantu yang meliputi kompetensi, komitmen, historical perkara yang pernah ditangani atau sedang ditangani oleh team maupun individu penyidik, data kegiatan yang dimasukkan ke system E-Manajemen Penyidikan akan diketahui indeks penilaian kinerja seorang penyidik dari tingkat Bareskrim sampai Polsek.

Ada beberapa tujuan dan manfaat dari Elektronik Manajemen Penyidikan yang ada pada Polres Bojonegoro yaitu sebagai berikut :

- a. Transparansi Penyidikan
- b. Personil polri dari tingkat polsek s/d mabes bisa mengakses penyidikan
- c. Memudahkan hubungan antar OrganisasiPolri-Kejaksaan- Pengadilan
- d. Masyarakat/Pelapor dengan mudahmengetahui perkembangan penyidikan
- e. Seluruh LP terinput dalam satu aplikasi.

Melalui program e-Penyidikan atasan penyidik maupun penyidik pembantu serta masyarakat pencari keadilan mengetahui secara detail dan rinci tentang kasus yang ditangani dan bisa dievaluasi hasil kinerja penyidik selama sebulan, triwulan, semester hingga satu tahun.

### Pengawasan Penyidikan melalui E-MP

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa penggunaan aplikasi sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) dalam akses dan penginputan data hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal mulai diberlakukan pada tahun 2017 dan baru pada tahun 2018 pengembangannya oleh Bareskrim Polri gencar dilakukan sehingga mempengaruhi budaya kerja sampai ke tingkat Direktorat Reserse Kriminal Polres Bojonegoro untuk aktif dalam melakukan akses dan penginputan data hasil pelaksanaan tugas sehari-hari, namun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan yang lebih disebabkan oleh personil yang bertanggungjawab dalam implementasi sistem E-MP ditingkat Bareskrim Mabes Polri sedang mengikuti pendidikan lanjutan dan sempat terjadi kekosongan, yang mana juga mempengaruhi menurunnya tekanan atasan di tingkat daerah termasuk Direktorat Reserse Kriminal Polres

Bojonegoro.

Kemudian baru pada tahun 2020 kembali digencarkan pengembangan dan pengelolaan sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) dengan pengawasan yang semakin optimal. Diketahui bahwa implementasi sistem dan melalui aplikasi sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Direktorat Reserse Kriminal Polres Bojonegoro saat ini sudah berjalan dengan baik meskipun dukungan fasilitas seperti PC/ laptop, handphone/ android dan jaringan internet/ wifi belum terpenuhi secara menyeluruh dan optimal dimana anggota Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam pelaksanaannya masih menggunakan perangkat milik pribadi masing-masing.

Kemudian semua level personil di Direktorat Reserse Kriminal Polres Bojonegoro mulai dari atasan Penyidik hingga anggota Penyidik/ Penyidik Pembantu sudah terbiasa menggunakan system elektronik dalam pemberkasan, pembuatan produk laporan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, meskipun secara spesifik melalui aplikasi sistem E-MP belum semua personil memahami secara rinci teknis penggunaannya, namun demikian tidak sampai menimbulkan penolakan dan keraguan (resistance dan skeptics), bahkan semua responden berkeyakinan system elektronik dan melalui E-MP sudah menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.

Implementasi sistem elektronik memberikan dampak secara organisasi, maupun individu anggota untuk mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi mengikuti perkembangan teknologi saat ini dan harapan besar personil aplikasi pada sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) dapat terus dikembangkan lebih sempurna dan mampu mengakomodir semua kegiatan dan tindakan kepolisian khususnya dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Hal ini senada dengan pendapat Lucas (1981) bahwa implementasi dari sebuah sistem merupakan suatu proses yang berkelanjutan, yang didalamnya termasuk pengembangan sistem secara keseluruhan baik studi kelayakan, desain dan analisis sistem, pemrograman, pelatihan, konversi dan instalasi dari sebuah system.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Polres Bojonegoro**

Dengan demikian faktor yang menjadi indikasi personil menggunakan Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Direktorat Reserse Kriminal Polres Bojonegoro diantaranya adalah:

- 1) Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) merupakan perwujudan dalam penjabaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 tahap III Polri yang harus didukung oleh semua level dan tingkatan personil Polri.
  - 2) Sistem E-MP berbasis website yang diperuntukan bagi Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam sistem manajemen penyidikan dan sebagai database perkara pidana serta mewujudkan transparansi.
  - 3) Aplikasi E-MP dirancang untuk mempermudah Penyidik/ Penyidik Pembantu membuat dokumen penyelidikan dan penyidikan, serta dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang cepat dan akurat.
  - 4) Pengoperasian dapat dilakukan dengan mudah dimana dan kapan saja oleh personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu dan Atasan Penyidik dapat secara cepat mendeteksi permasalahan dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelesaiannya.
  - 5) Penilaian/ raport kinerja Penyidik/ Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu salah satunya dilihat dari aktifitas melalui aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP).
  - 6) Peraturan Kapolri merupakan bentuk perintah yang sudah menjadi kewajiban bagi personil Polri untuk melaksanakannya
- Adapun beberapa hambatan yang ada pada pengembangan system elektronik manajemen penyidikan ini adalah sebagai berikut:
- a. Akan terjadi kesusahan/kesulitan jika masyarakat / pelapor tidak memiliki Email karena Tembusan SP2HP akan dikirimkan by Email
  - b. Karena seluruhnya terinput dalam satu aplikasi, rentan terjadi server down.

## Peran Pengawasan (Internal) dalam Pelaksanaan Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Polres Bojonegoro

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diperoleh informasi bahwa Atasan Penyidik dan bagian pengawas penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Polres Bojonegoro dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mulai dari terbitnya surat perintah penyelidikan hingga selesainya tahapan penyidikan sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) pengawasan lebih mudah dilakukan pimpinan, khususnya terkait pemantauan tahapan-tahapan atau urutan dokumen yang perlu dipenuhi sesuai dengan limit waktunya, dan hal ini dinilai personil sangat mempengaruhi peningkatan kinerja Penyidik/ Penyidik pembantu.

Diperoleh informasi tentang dukungan tim teknis (technical support team) yang berkenaan dengan penggelaran e-MP baik yang menerima ataupun membalas pertanyaan- pertanyaan yang berkaitan dengan penggelaran e-MP. Diagram di atas menggambarkan bahwa 70,6% responden menjawab tim teknis tersedia, 11,7 dan 29,4% responden menjawab tidak tersedia tim, ini artinya dukungan tim teknis cenderung sudah bagus meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya tersedia atau dapat dikatakan “standby” setiap saat.

Dari hasil wawancara diketahui pula bahwa operator di tingkat Polres dan Polsek jika mengalami kendala dalam pengoperasian e-MP, mereka akan bertanya langsung ke tim teknis tingkat Polda dan tim teknis ini akan feedback ke operator tersebut. Bahkan di Polres Bojonegoro sering dapat informasi dari Bareskrim kalau server Bareskrim tidak dapat diakses.

Penggunaan E-Manajemen Penyidikan di Satreskrim Polres Bojonegoro juga dirasa memberikan efektifitas dan efisien, karena dapat memberikan analisa dan evaluasi terhadap kinerja penyidik, mempermudah database penyidikan, serta mengontrol kinerja dari penyidik/penyidik pembantu di Satreskrim Polres Bojonegoro.

## Analisa Penelitian Menggunakan Teori William N. Dunn

### 1) Efektifitas (*effectiveness*)

Menurut peneliti, aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan yang ada pada Polres Bojonegoro sudah berjalan efektif. Hanya saja sedikit mengalami hambatan dalam

pengembangan aplikasinya agar semakin lebih baik. Namun peneliti juga menyoroti dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan lain yang masih belum berjalan efektif. Sehingga harapannya mampu menjangkau seluruh elemen. Dalam tata cara pemanfaatan aplikasi E- Manajemen Penyidikan ini diperlukan perencanaan atau persiapan yang matang Seperti anggaran untuk mengadakan jaringan internet, membeli komputer atau laptop baru guna menginput data-data proses penyidikan ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

Selain itu dibutuhkan juga sumber daya manusia dari penyidiknya mengenai pengetahuan dari pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini, harus ada pelatihan terkait pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan sehingga penyidik mengetahui cara untuk mengoperasikan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini, selain itu ada administrasi penyidikan atau data lain yang harus disiapkan untuk diinput ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan, serta Penyidik di Polres Bojonegoro Harus mempunyai akun pada aplikasi ini agar dapat mengakses aplikasi E-Manajemen Penyidikan, ada juga waktu kosong yang harus disiapkan dalam menginput data ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

### 2) Efisiensi (*efficiency*)

Menurut peneliti aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan ini sudah cukup efisien. Namun, keterbatasan anggaran membuat aplikasi ini tidak berjalan maksimal. Peneliti merasa bahwa aparat kepolisian Polri maupun Polres Bojonegoro sendiri perlu memfokuskan untuk semakin menjadikan aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan ini sebagai pintu utama dalam melakukan pengaduan dan memantau bagaimana perkembangannya.

### 3) Kecukupan (*adequacy*)

Menurut peneliti, aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan belum cukup menjangkau masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum mengetahui secara menyeluruh mengenai website Elektronik Manajemen Penyidikan ini sehingga peneliti merasa bahwa keberadaan Elektronik Manajemen Penyidikan belum cukup menjangkau semua orang.

Pengorganisasian diperlukan dalam proses tata cara pemanfaatan aplikasi E- Manajemen Penyidikan untuk mengatur dan membagi unsur-unsur petugas/ personil Satuan Reskrim Polres Bojonegoro, peralatan, anggaran dan metode di dalam hubungan organisasi. Pengorganisasian diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan kerja dan pengawasan pimpinan.

Akan tetapi masih ada penyidik yang belum memanfaatkan aplikasi tersebut, ada beberapa hal yang mungkin menjadi alasan pembenar, yaitu sibuknya para penyidik dalam menghadapi pekerjaan mereka, tidak ada waktu untuk menginput data kedalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan, karena penyidik di Satuan Reskrim Polres Bojonegoro pekerjaannya tidak hanya dalam penegakan hukum atau represif. Akan tetapi mereka juga melakukan tugas preventif atau pencegahan seperti Program Reskrim masuk kampung yang merupakan kegiatan terobosan yang sangat baik dan cocok terutama kepada warga masyarakat di tingkat bawah sehingga masyarakat akan mengetahui dan paham tentang tugas pokok Reskrim.

#### 4) Perataan (*equity*)

Penyebaran informasi dan sosialisasi Elektronik Manajemen Penyidikan berjalan belum cukup merata namun sudah berjalan dengan baik. Walaupun peneliti juga mendapat temuan data bahwa Polres Bojonegoro sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan telah menyampaikan bahwa sosialisasi telah dilakukan namun, masih ada masyarakat yang belum mengenal aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan ini. Pelaksanaannya E-Manajemen Penyidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

##### a. Man

Sumber daya manusia memang menjadi pengaruh penting dalam mendukung pemanfaatan sistem aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Kualitas personil dalam pemahaman pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan sangat berpengaruh.

##### b. Money

Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa Satuan Reskrim Polres Bojonegoro belum Mendapatkan anggaran Khusus dalam pemanfaatan aplikasi E-

Manajemen Penyidikan sehingga dalam pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan anggota Satuan Reskrim Polres Bojonegoro masih menggunakan biaya mandiri dalam hal pembelian Kuota Internet serta sarana dan prasarana yang mendukung untuk mengakses Aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini.

##### c. Material

Faktor material sebagai prasarana untuk koneksi internet sangat mendukung Penyidik dalam pelaksanaan aplikasi E-Manajemen Penyidikan karena dengan tidak adanya koneksi internet maupun gangguan jaringan internet maka dalam pengaksesan aplikasi ini juga akan terhambat dan terganggu.

##### d. Mesin (*Machine*)

Dari sudut pandang Penyidik, ketiga faktor sarana tersebut merupakan faktor yang harus terpenuhi sehingga dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan dapat berjalan dengan maksimal serta mempercepat pekerjaan penyidik dalam menangani suatu perkara pidana.

#### 5) Responsivitas (*responsiveness*)

Respon yang diberikan kepada pengembangan aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan berjalan kurang maksimal dikarenakan masih adanya sever yang berjalan di dalam system Elektronik Manajemen Penyidikan yang belum berjalan maksimal Hal ini membuat progress penyempurnaan aplikasi ini berjalan sangat lambat dan tentunya akan mengganggu dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Bojonegoro.

#### 6) Ketepatan (*appropriateness*)

Peneliti beranggapan bahwa aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan ini dibuat sudah sangat tepat. Hal ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Bojonegoro sudah memiliki keterjangkauan mengenai teknologi informasi yang perlu dikembangkan dan peneliti merasa bahwa system Elektronik Manajemen Penyidikan perlu dikunjungi oleh masyarakat luas. Namun peneliti merasa bahwa Polres Bojonegoro juga perlu fokus dalam pengembangan aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan dan sosialisasi lebih

baik kepada masyarakat agar semakin mengenal apa itu Elektronik Manajemen Penyidikan.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

- a. Implementasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro sudah berjalan dengan sangat baik dan sudah terintegrasi secara nasional. Pengembangannya terus dilakukan Bareskrim Polri dan mendapat dukungan yang sangat baik dari personil Penyidik/ Penyidik pembantu agar menjadi sistem yang memuat database perkara pidana yang akan mempermudah dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang cepat dan akurat, serta terwujudnya transparansi, sekaligus sebagai sarana kontrol/ pengendalian dan raport kinerja penyidik.
- b. Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) merupakan perwujudan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 tahap IIPolri yang diperuntukan bagi Penyidik/ Penyidik pembantu dalam sistem manajemen penyidikan dan sebagai database perkara pidana guna mewujudkan transparansi. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pembuatan dokumen penyelidikan dan penyidikan dan dapat diakses dengan mudah dimana dan kapan saja oleh Atasan Penyidik, sehingga dapat secara cepat mendeteksi permasalahan dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelesaiannya, selain sebagai sarana penilaian kinerja personil.
- c. Peran Pengawasan (Internal) Penyidikan dalam optimalisasi Implementasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro saat ini telah berjalan semakin baik senada dengan upaya Bareskrim Polri dalam optimalisasi implementasi sistem E-MP. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- d. Keterbatasan saat dilaksanakan penelitian disebabkan oleh adanya pergantian pimpinan di lingkungan Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro yang diikuti perombakan personil Penyidik/ Penyidik Pembantu dan sistem kerja khususnya

dalam aktivitas melalui aplikasi E-MP sehingga mempengaruhi responden dalam menanggapi pertanyaan dalam wawancara maupun pernyataan di dalam wawancara yang diberikan peneliti, yang kemudian juga berdampak pada informasi yang diperoleh peneliti tidak begitu mengena atau sesuai dengan harapan.

### 2. Rekomendasi

- a. Dalam rangka optimalisasi implementasi sistem elektronik manajemen penyidikan (E-MP), agar kiranya dukungan sarana-prasarana seperti PC/laptop, jaringan internet/ wifi maupun sarana komunikasi berupa handphone termasuk dukungan anggarannya dapat difasilitasi oleh organisasi secara maksimal dan pengembangan aplikasi E-MP sesegera dilakukan hingga mampu mengakomodir semua tugas dan fungsi di kepolisian dan dapat terhubung dengan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi penegak hukum terkait lainnya sehingga terwujud transparansi penegakan hukum yang berkeadilan.
- b. Bagi Atasan Penyidik dan bagian pengawas penyidikan agar kiranya dalam melaksanakan pengawasan tidak hanya sebatas kuantitas namun perlu diteliti kualitas produk dokumen yang dihasilkan oleh setiap Penyidik/ Penyidik pembantu sehingga tidak terjadi perbedaan antara produk dokumen yang dihasilkan secara nyata dengan dokumen yang terinput di E-MP dan dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait implementasi elektronik manajemen penyidikan (E-MP)
- c. Bagi personil Penyidik/ Penyidik pembantu agar kiranya lebih tertib dan tepat waktu dalam melakukan akses, input dokumen dan kegiatan sehingga E-MP sebagai sistem yang memuat database perkara pidana dapat segera terwujud, kemudian diberlakukan penghargaan maupun sanksi (*reward and punishment*) bagi kinerja Penyidik/ Penyidik pembantu terkait aktivitasnya di sistem E-MP. Kemudian Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) merupakan bentuk sarana perubahan budaya kerja sistem penyidikan Polri dalam sistem informasi manajemen (SIM)

yang sarannya untuk meningkatkan penyelesaian tindak pidana dengan kerangka penguatan fungsi penyidikan, penguatan fungsi pengawasan penyidikan dan penguatan koordinasi dengan criminal justice system bersama lembaga terkait lainnya hingga akhirnya akan terwujud Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis IT (SPPT TI), maka peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait sejauh mana kesiapan instansi penegak hukum lainnya dalam mengimplementasikannya seperti Kejaksaan yang menggunakan Case Management Sistem (CMS), Mahkamah Agung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan PAS dengan Sistem Database Masyarakat (SDP) termasuk penelitian terkait pengembangan sistemnya bagi kepentingan informasi publik.

- d. Hendaknya proyek perubahan berupa integrasi sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Kemenkumham ini harus segera direalisasikan guna mengoptimalkan budaya organisasi yang berbasis pada kinerja digital. Selain itu SOP dari Bareskrim terkait pelaksanaan E-Manajemen Penyidikan hendaknya segera dibentuk guna standarisasi cara yang dilakukan personil polri dalam menyelesaikan pekerjaan input E-Manajemen Penyidikan yang menjadi tugasnya..
- e. Bagi Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, hendaknya menerapkan gaya komunikasi kepemimpinan dinamis (*dynamic style*) yang mengadopsi sistem komunikasi interpersonal pimpinan dan bawahan dengan model komunikasi hubungan tugas (instruksi tugas) dan model komunikasi hubungan sosial guna percepatan perubahan dari budaya kerja lama ke budaya kerja baru yang berbasis digital.

## REFERENSI

- Miles, M. ., & Huberman, A. . (1992). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (P. T. . Rohidi (ed.)). Universitas Indonesia.
- Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Alfabeta.
- Subarsono, A. (2013). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Prasindo.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Prasindo
- Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Shomad, Abd, and Prawitra Thalib. Pengantar Filsafat Hukum. Airlangga University Press, 2020.
- Amanda, P. I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, 1(1), 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/>.
- Wijoyo, Suparto, Prawitra Thalib, and Mohamad Nur Kholiq. "Merekonstruksi Good Corporate Governance Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Incorporated Sebagai Negara Kesejahteraan (Perspektif Regulasi Deregulasi-Reregulasi Model Jatimomic)." Airlangga Development Journal 6.1 (2022): 44-54
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UGM Press.
- Hafni, R., Sinulingga, N. S. B., & Hasibuan, L. S. (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung tunai dana desa pada ketahanan pangan di era pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara). Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan, 2(1), 103–111.
- Sumarso, Laporan Proyek Perubahan Modernisasi Penguatan Penyidikan Perkara Pidana Sistem Informasi Pengawasan Tindak Pidana, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Diklatpim Tk. I Lan Angkatan XL Tahun 2018.
- HANDAYANI, F. (2022). Implementasi Kebijakan Aplikasi Sipolima Pada Dinas Kominfo Kota Baubau Dalam Meningkatkan Kinerja Asn Ditengah Pandemi Covid-19. Doctoral Dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN

- DALAM NEGERI, 12, 12.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90.  
<https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Mais, R., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung Ririn. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–9.  
<https://media.neliti.com/media/publications/103420-ID-pengaruh-aksesoris-dan-elemen-pembentuk.pdf>
- Mutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik (Issue April).
- Wahab, S. A. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (ed.)). Bumi Aksara.

